



LAPORAN KINERJA

**PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**TRIWULAN II
2024**



Kata Pengantar

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) Triwulan II Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai laporan atas realisasi dan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Pusdatin serta memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusdatin untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 4 Indikator Kinerja yang pengukurannya dilakukan secara triwulanan, yaitu Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen; Survei Kepuasan Masyarakat KKP; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin; dan Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin. Seluruh Indikator ini telah mencapai target Triwulan II sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Pusdatin Triwulan II Tahun 2024 ini, dan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai evaluasi kinerja untuk triwulan berikutnya.

Wassalamualaikum warohmatullahiwabarokatuh.

Jakarta, 19 Juli 2024

Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan



Aulia Riza Farhan, S.T., M.Sci.Tech., Ph.D.

NIP. 197208122001121002

Laporan Kinerja
Triwulan II 2024

PUSAT DATA, STATISTIK DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Ringkasan Eksekutif

Pusdatin dalam rencana kinerjanya memfokuskan dukungan pada kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Pada tahun 2024 Pusdatin memiliki 2 Sasaran Kegiatan dan 21 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, yang merupakan turunan dari tugas, pokok, dan fungsi Pusdatin. Dari 21 Indikator Kinerja terdapat 4 indikator yang capaiannya dinilai secara triwulan, 2 indikator yang dinilai secara semesteran, dan 15 indikator yang dinilai secara tahunan. Berdasarkan *Dashboard* aplikasi Kinerjaku (*kinerjaku.kkp.go.id*), capaian kinerja Pusdatin Triwulan II Tahun 2024 ditunjukkan dengan Skor Kinerja sebesar 98,24%. Hasil analisis terhadap IKU yang telah dilakukan pengukuran pada Triwulan I Tahun 2024, dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian Kinerja Pusdatin Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target	Realisasi TW II	Capaian (%)
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan	2.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Setjen (persen)	94	127,08	135,19
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	88,30	90,78	102,8
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi	16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP	100	0	0
		18.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin	80	87,09	108,86
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	80	100	125



Sasaran Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW II	Capaian (%)
	20. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Pusdatin (persen)	94	133,33	141,84

Realisasi Penyerapan DIPA Pusdatin per 30 Juni tahun 2024 berdasarkan aplikasi SAKTI dari pagu senilai **Rp 129.214.041.000,-** telah direalisasikan senilai **Rp 11.784.464.134,-** dengan persentase realisasi anggaran adalah sebesar **9,64%**, dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 117.429.576.866,-**. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023, ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024. Terkait dengan hal tersebut, maka Pusdatin melakukan AA senilai **Rp 26.198.710.000,-** atau sebesar **20,28%** dari total pagu anggaran.

Sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan, seluruh penanggung jawab indikator kinerja dan Tim SAKIP Pusdatin akan melakukan evaluasi capaian secara berkala serta melakukan pemantauan untuk pencapaian kinerja pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun anggaran 2024.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusdatin.....	3
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pusdatin	9
1.2.3 Sumber Daya Manusia Pusat Data, Statistik dan Informasi	9
1.2.4 Kelompok Jabatan Fungsional	12
1.3 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja.....	13
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Sasaran Kegiatan	15
2.2 Penetapan Kinerja dan Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun 2024	16
2.3 Program dan Kegiatan	18
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	22
3.2.1 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan.....	22
3.2.2 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal.....	24
3.2.3 Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	27
3.2.4 Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim	28
3.2.5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP	29
3.2.6 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP.....	31
3.2.7 Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi.....	33



3.2.8 Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	34
3.2.9 Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan.....	37
3.2.10 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP	39
3.2.11 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektorial KKP	40
3.2.12 Indeks Pelayanan Publik KKP	42
3.2.13 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	44
3.2.14 Survei Kepuasan Masyarakat KKP	46
3.2.15 Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin.....	50
3.2.16 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP.....	52
3.2.17 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin.....	54
3.2.18 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin.....	55
3.2.19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin.....	61
3.2.20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin	63
3.2.21 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin.....	64
3.3 Realisasi Anggaran	65
BAB 4 PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Rencana Tindak Lanjut	69
LAMPIRAN	70



Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Kinerja Pusdatin Triwulan II Tahun 2024	iii
Tabel 2. Tim Kerja Lingkungan Pusdatin Tahun 2024	4
Tabel 3. Jumlah Sumber Daya Manusia Pusdatin	10
Tabel 4. Sebaran Jenjang Pendidikan Pegawai Pusdatin.....	10
Tabel 5. Distribusi Pegawai Pusdatin.....	11
Tabel 6. Jumlah Pejabat Fungsional Pusdatin	12
Tabel 7. Target Indikator Kinerja Utama Pusdatin Tahun 2024	16
Tabel 8. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pusdatin Tahun 2024	20
Tabel 9. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP	23
Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Lingkup Setjen Triwulan II Tahun 2024	25
Tabel 11. Target dan Realisasi IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi.....	27
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU Persentase Layanan Sistem Informasi	28
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU Indeks SPBE KKP Triwulan I Tahun 2024	30
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik	31
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial	33
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	35
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan	38
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP... ..	39
Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan	41
Tabel 20. Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik KKP Triwulan II Tahun 2024... ..	43
Tabel 21. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	45
Tabel 22. Target dan Realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat KKP	47
Tabel 23. Target dan Realisasi IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin	51
Tabel 24. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP	53
Tabel 25. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK.....	54



Tabel 26. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin
Triwulan II Tahun 2024 60

Tabel 27. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan..... 62

Tabel 28. Target dan Realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Lingkup Pusdatin Triwulan II
Tahun 2024..... 64

Tabel 29. Target dan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin
Triwulan II Tahun 2024 65

Tabel 30. Target dan Realisasi Anggaran Pusdatin Menurut Output Tahun 2024 66



Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdatin.....	8
Gambar 2. Distribusi Pegawai Lingkup Pusdatin	11
Gambar 3. Dashboard Skor Kinerja Pusdatin Triwulan II.....	19
Gambar 4. Dashboard Skor Kinerja Pusdatin Triwulan II.....	20
Gambar 5. Kegiatan Validasi Nasional Angka Produksi Semester II Tahun 2023	24
Gambar 6. Grafik Capaian Manajemen Pengetahuan per Satuan Kerja Setjen Triwulan II Tahun 2024.....	26
Gambar 7. koordinasi antara Pusdatin dan Unit Kerja Eselon I	29
Gambar 8. Inovasi Pelayanan Publik KKP	32
Gambar 9. Penilaian dan Verifikasi Cyber Security Maturity (CSM) 2024.....	36
Gambar 10. Zoom Validasi SKM TW II.....	49
Gambar 11. Optimalisasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat_KemenPANRB.....	49
Gambar 12. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdatin Menurut Rincian Ouput Triwulan II Tahun 2024	67



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Pusdatin) Triwulan II Tahun 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu dalam pengelolaan kinerja, merujuk juga pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pusdatin sebagai institusi yang mempunyai tugas memberikan layanan tentang informasi kelautan dan perikanan, dituntut untuk selalu menyajikan data yang tepat waktu, akurat, lengkap dan berkelanjutan serta dibutuhkan oleh *stakeholders*, serta memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020-2024.



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, bahwa pelaksanaan Transformasi Digital RPJMN 2020–2024 meliputi:

1. Peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK dalam negeri, melalui **Harmonisasi kebijakan dan regulasi** untuk mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri; **Peningkatan kapasitas SDM TIK** yang tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; **Peningkatan literasi digital** masyarakat;
2. Adopsi pemanfaatan teknologi global (*Big Data*, IoT, AI, dan lain-lain) bersifat lintas sektor dalam proses perencanaan, pemantauan, maupun pelaksanaan kinerja, melalui: **pelaksanaan Satu Data** dalam rangka pemanfaatan data yang saling interoperabilitas, terstandar dan dapat dibagipakaikan serta mendukung pelaksanaan operasional *command center* dan implementasi *collaboration office*.

Untuk mendukung pelaksanaan transformasi digital sesuai dengan RPJMN, implementasi tersebut ditindaklanjuti dalam arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, yang meliputi :

1. Tujuan pembangunan berkelanjutan;
2. Gender;
3. Modal sosial budaya; dan
4. Transformasi digital.

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerjasama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



(SPBE) KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis *web (on-line)*, serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

Dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perikanan Indonesia, diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat dioperasionalkan secara terintegrasi dengan *existing system* yang ada di KKP saat ini. Pengembangan sistem ini menjadi langkah besar KKP dalam mengimplementasikan program percepatan pelaksanaan penangkapan ikan terukur dan pemantauan kegiatan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Sistem ini akan diimplementasikan dalam sarana Pusat Kontrol Maritim (*Command Center*) yang dioperasionalkan oleh KKP, dimana kegiatan ini merupakan Program Nasional dan kegiatan prioritas Pusdatin. Laporan Kinerja Pusdatin Triwulan II Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran Akuntabilitas Kinerja Pusdatin tahun 2023 yang mencakup pencapaian tugas pokok dan fungsi, kewenangan, tujuan dan sasaran, visi dan misi, serta kebijakan yang ditetapkan.

1.2 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusdatin

Sesuai dengan Surat Tugas Kapusdatin Nomor B.2260/SJ.7/KP.440/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, dan dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka telah ditetapkan Pusdatin memiliki 7 (tujuh) Tim Kerja, dengan uraian fungsi sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2. Tim Kerja Lingkungan Pusdatin Tahun 2024

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
1.	Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Melakukan penyiapan, pengumpulan, penyusunan dan pendampingan serta pelaporan pelayanan publik.
		Nilai Mutu Pelayanan Unit Kerja PTSA	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi penyiapan, pengumpulan dan penyusunan dokumen dalam pengelolaan fasilitas pelayanan terpadu satu atap di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. Melakukan koordinasi penyiapan, pengumpulan, penyusunan dokumen dalam Pengelolaan Nilai Mutu Pelayanan Publik; c. Melakukan koordinasi penyiapan, pengumpulan dan penyusunan dokumen Zona Integritas WBK/WBBM.
2.	Pengelolaan Data dan Statistik	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi, perencanaan, dan standardisasi pengelompokan data dan metodologi statistik kelautan dan perikanan; b. Melakukan koordinasi, pengumpulan, pengolahan, dan pemeriksaan data kelautan dan perikanan; c. Melakukan koordinasi, analisis, penyajian, penyebarluasan data kelautan dan perikanan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi data kelautan dan perikanan.
		Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengelolaan data kelautan dan perikanan mendukung implementasi Satu Data Indonesia; b. Melaksanakan tugas sebagai Walidata Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3.	Standardisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP dan Aplikasi Sistem Informasi	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan penyiapan bahan evaluasi SPBE di lingkungan KKP; b. Koordinasi pelaksanaan clearance anggaran teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KKP dengan instansi terkait;



No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> c. Monitoring dan evaluasi implementasi arsitektur SPBE di lingkungan KKP; d. Penyusunan kebijakan tata kelola SPBE di lingkungan KKP.
		Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan koordinasi dalam pemenuhan Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP; b. Monitoring dan evaluasi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP.
		Indeks Layanan Sistem dan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengelolaan layanan surat elektronik (e-mail) KKP; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka evaluasi layanan aplikasi; c. Melakukan pengintegrasian dan pemeliharaan aplikasi; d. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka sistem perizinan berusaha.
		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam pemenuhan Persentase Unit Kerja Pusdatin yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan dokumen standarisasi aplikasi.
4.	Pengelolaan Kendali Maritim	Persentase Layanan Sistem Informasi Pengelola Kendali Maritim	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi merupakan sistem untuk menyediakan data dan informasi yang terpusat untuk dapat menggambarkan situasi secara <i>real time</i>; b. Melakukan pengelolaan data dan informasi bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut dan



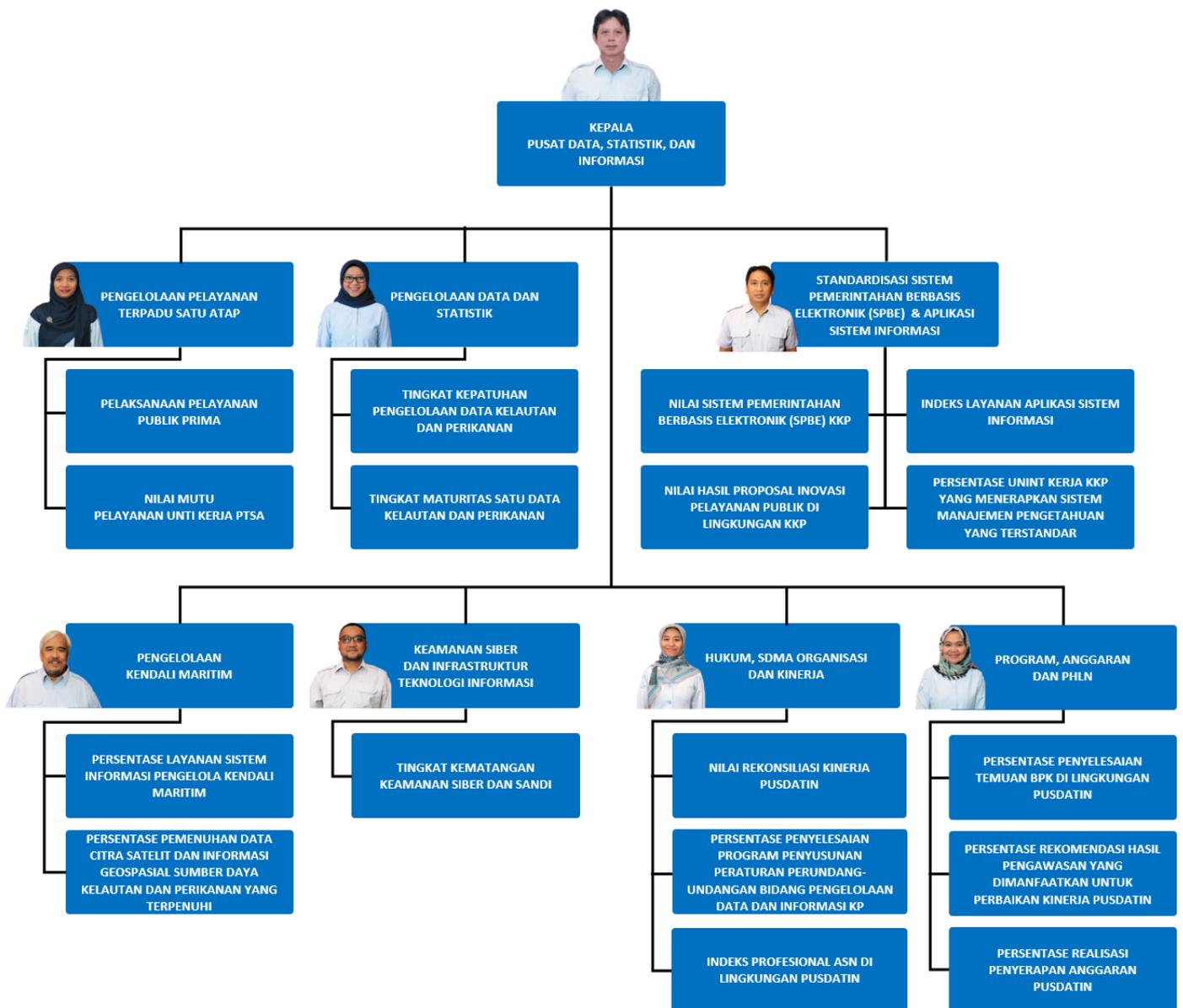
No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
			<p>pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>c. Melakukan visualisasi data dan informasi bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan hasil kajian dan analisis data untuk kebutuhan decision support system;</p> <p>d. Melakukan pengelolaan operasional dan pemeliharaan aset command center dan komputasi lingkup KKP;</p> <p>e. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase layanan sistem informasi pengelolaan kendali maritim.</p>
		<p>Persentase pemenuhan data citra satelit dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang terpenuhi</p>	<p>a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka persentase pemenuhan data citra satelit dan informasi gespasial sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>b. Melakukan penyediaan sistem yang terintegrasi dan infrastruktur sistem satelit nano untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan fungsi kontrol, monitoring, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penyediaan transponder dan sistem monitoring situasi maritim;</p> <p>c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan integrasi dari beberapa sistem informasi dan unit kerja eselon I yang telah ada, serta data citra berbasis satelit yang dimiliki KKP.</p>
5.	Keamanan Siber dan Infrastruktur Teknologi Informasi	Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Informasi	<p>a. Melakukan kegiatan keamanan siber dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;</p> <p>b. Melakukan kegiatan pengelolaan bandwidth dan infrastruktur jaringan KKP pusat.</p>



No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
6.	Hukum, Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Kinerja	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusdatin	<p>a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusdatin;</p> <p>b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan laporan kinerja, laporan tahunan, SAKIP.</p>
		Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP	Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan data statistik dan informasi KP.
		Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin	<p>a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pusdatin;</p> <p>b. Melakukan pengelolaan layanan kearsipan dan persuratan.</p>
7.	Program, Anggaran dan PHLN	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin	<p>a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Pusdatin;</p> <p>b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan PIPK.</p>
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin	Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusdatin.
		Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin	<p>a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase realisasi penyerapan anggaran Pusdatin;</p> <p>b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan anggaran APBN/Pinjaman Hibah Luar Negeri;</p>



No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
			c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan terkait pengadaan barang dan jasa; d. Penyiapan laporan keuangan dan BMN, pencatatan BMN.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdatin



1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pusdatin

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusdatin menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, pengolahan, analisis, dan bimbingan teknis data dan statistik kelautan dan perikanan;
- c. koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, perancangan, pengembangan, bimbingan teknis, integrasi, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi;
- d. koordinasi penyusunan, perencanaan, perancangan, pengembangan, standardisasi, bimbingan teknis, pengintegrasian, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
- e. pengelolaan aplikasi sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. koordinasi perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik;
- g. koordinasi standardisasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik;
- h. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Pusdatin; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Pusdatin.

1.2.3 Sumber Daya Manusia Pusat Data, Statistik dan Informasi

Dalam rangka mengemban tugas, Pusdatin didukung oleh 99 orang pegawai yang terdiri dari 77 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 11 orang Pegawai Pemerintah



dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 11 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Sumber Daya Manusia Pusdatin

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Eselon II	1
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	71
3.	Jabatan Fungsional Umum	16
4.	PPNPN	11
Total		99

Jika dilihat dari tingkat pendidikan pegawai ASN di Pusdatin mempunyai latar belakang pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Sebaran Jenjang Pendidikan Pegawai Pusdatin

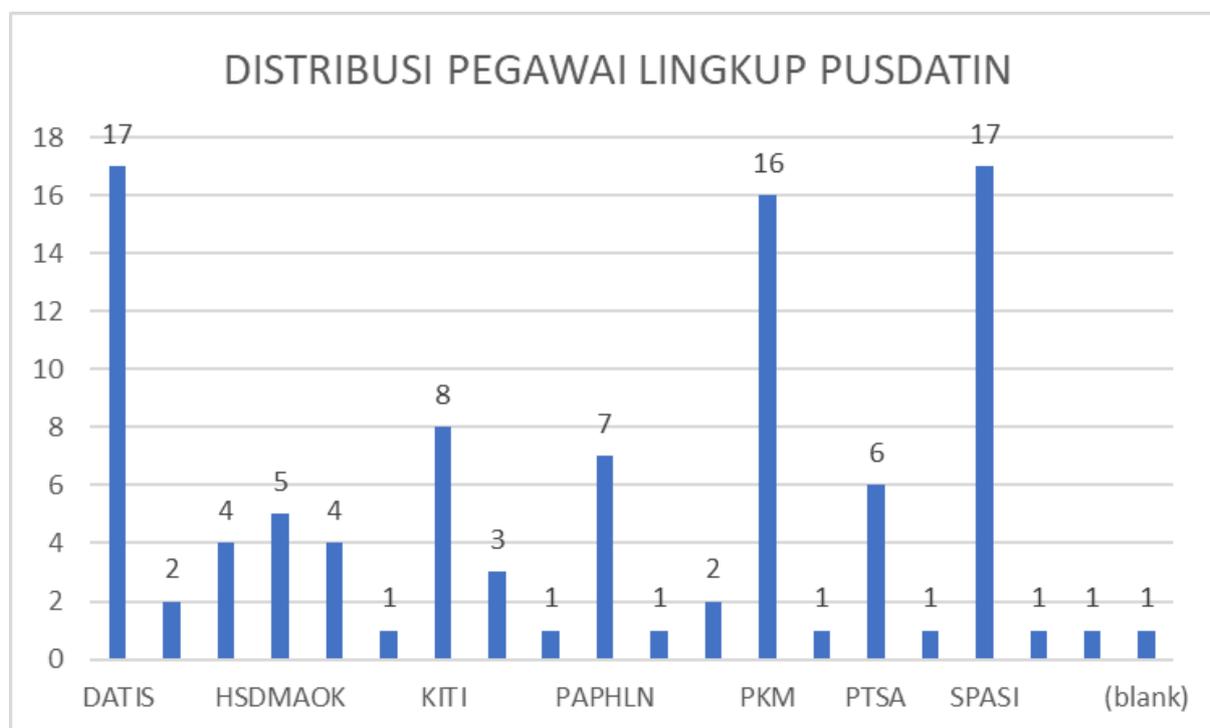
No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S3	3
2.	S2	19
3.	S1	55
4.	D3	33
5.	D1	1
6.	SLTA	7
Jumlah		88

Jika dilihat dari golongan ruang, terdapat 13 orang golongan IV, 69 orang golongan III, dan 6 orang golongan II. Sedangkan berdasarkan gender, perbandingan antara pegawai Laki-laki sebanyak 49 orang dan Perempuan sebanyak 39 orang. Distribusi aparatur Pusdatin baik Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) sesuai Kelompok adalah sebagai berikut :



Tabel 5. Distribusi Pegawai Pusdatin

No.	Tim Kerja	Status Kepegawaian		
		PNS	PPPK	PPNPN
1.	Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap	6	1	0
2.	Data dan Informasi	17	4	2
3.	Standarisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aplikasi Sistem Informasi	17	1	1
4.	Pusat Kontrol Maritim	16	1	0
5.	Keamanan Siber dan Infrastruktur Teknologi Informasi	8	1	3
6.	Hukum, SDMA Organisasi dan Kinerja	5	1	4
7.	Program, Anggaran dan PHLN	7	2	1



Gambar 2. Distribusi Pegawai Lingkup Pusdatin



1.2.4 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusdatin mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada Unit Kerja Pusdatin terdiri atas Pranata Komputer, Statistisi, Analis Kebijakan, Surveyor Pemetaan, Perencana, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Arsiparis, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di Pusdatin, sampai dengan 31 Maret 2024.

Tabel 6. Jumlah Pejabat Fungsional Pusdatin

No.	Jenjang Jabatan Fungsional Lingkup Pusdatin	Jumlah Sebaran Jabfung (orang)				
		Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Mahir	Terampil
1.	Pranata Komputer	7	12	21	1	2
2.	Statistisi	6	2	10		
3.	Perencana	1	1			
5.	Analis Kebijakan		1	1		
6.	Analis Pengelola Keuangan APBN		1			
7.	Pranata Keuangan APBN					1
8.	Surveyor Pemetaan	2		2		1
9.	Analis SDM			1		
10.	Arsiparis				1	
11.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa					
Total		16	17	35	2	4

Catatan : Termasuk Pejabat Transformasi dan PPPK



1.3 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 disusun untuk menginformasikan capaian kinerja Pusdatin berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada penetapan kinerja tahun 2024 dan sesuai dengan target kinerja tahunan sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Dengan membandingkan antara capaian kinerja (*performance result*) tahun 2023 dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan, maka akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*). Dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Pusdatin adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, organisasi dan personalia, sistematika penyajian.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan atau ikhtisar penjanjian kinerja Pusdatin yang telah dicapai dalam satu tahun.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Hasil capaian dilengkapi dengan analisa:

a. Capaian Kinerja Organisasi

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan periode yang sama tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya (dapat dilihat di SPAN/PMK 249);
- Analisa program/kinerja yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



b. Realisasi Anggaran

Berisi uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pusdatin sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah salah satu bagian dari perjanjian kinerja yang merupakan salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan kegiatan dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa depan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu sehingga mudah dalam pengukurannya. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Adapun tujuan Pusdatin adalah sebagai berikut :

1. mewujudkan penyajian data, statistik dan pelayanan informasi secara berkesinambungan;
2. mewujudkan sarana jaringan Sistem Informasi Manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pelayanan alur data maupun informasi secara tepat, cepat dan efisien;
3. mewujudkan sistem informasi secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai sumber informasi lingkup kementerian;
4. terciptanya SDM yang handal dalam teknologi informasi dan data statistik; dan
5. terwujudnya data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir guna mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka pada Tahun 2024 Pusdatin mempunyai 2 (dua) Sasaran Kegiatan yaitu “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Pengelolaan Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan”, dan



“Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diperlukan indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Pada masing-masing sasaran ditetapkan indikator yang dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

2.2 Penetapan Kinerja dan Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun 2024

Pada tahun 2024 Pusdatin mempunyai 2 (dua) Sasaran Kegiatan yaitu “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Pengelolaan Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan”, dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi” dan diuraikan ke dalam 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama.

Penetapan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pejabat Eselon I bagi PK pejabat Eselon II serta oleh Menteri Kelautan dan Perikanan bagi PK pejabat Eselon I. PK Pusdatin Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7. Target Indikator Kinerja Utama Pusdatin Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target Tahun 2024
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91
		2.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Setjen (persen)	94
		3.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5



Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	
		4. Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	76	
		5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,05	
		6. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	76	
		7. Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	76	
		8. Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2,5	
		9. Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	70	
		10. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP (nilai)	3	
		11. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai)	2,75	
		12. Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,59	
		13. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	85	
		14. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	88,30	
		2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi	15. Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	84
			16. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (persen)	100
			17. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100
18. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin (indeks)	85			
19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	80			



Sasaran Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
	20. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Pusdatin (persen)	94
	21. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95

2.3 Program dan Kegiatan

Pusdatin merupakan unit Eselon II yang berada di bawah Sekretariat Jenderal KKP, melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan, yaitu “Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”. Sejak Tahun Anggaran 2023, telah diimplementasikan kebijakan 1 DIPA dimasing-masing unit kerja Eselon I lingkup KKP, sedangkan DIPA Sekretariat Jenderal KKP dikelola di Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa. Pusdatin yang merupakan unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal melaksanakan empat kegiatan dalam Rincian *Output* (RO). RO tersebut akan memenuhi Sasaran Kegiatan, yaitu “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan” dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi”.

Untuk mencapai sasaran tersebut dengan sejumlah target indikator sebagaimana tabel di atas, telah dialokasikan anggaran pada tahun 2024 senilai **Rp 129.214.041.000,-**.

Pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut di atas dijabarkan kepada target kinerja tahunan dan triwulanan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKJ) Pusdatin Triwulanan dan Tahunan.



BAB 3

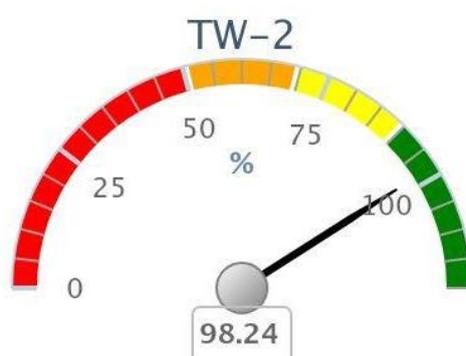
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KKP.

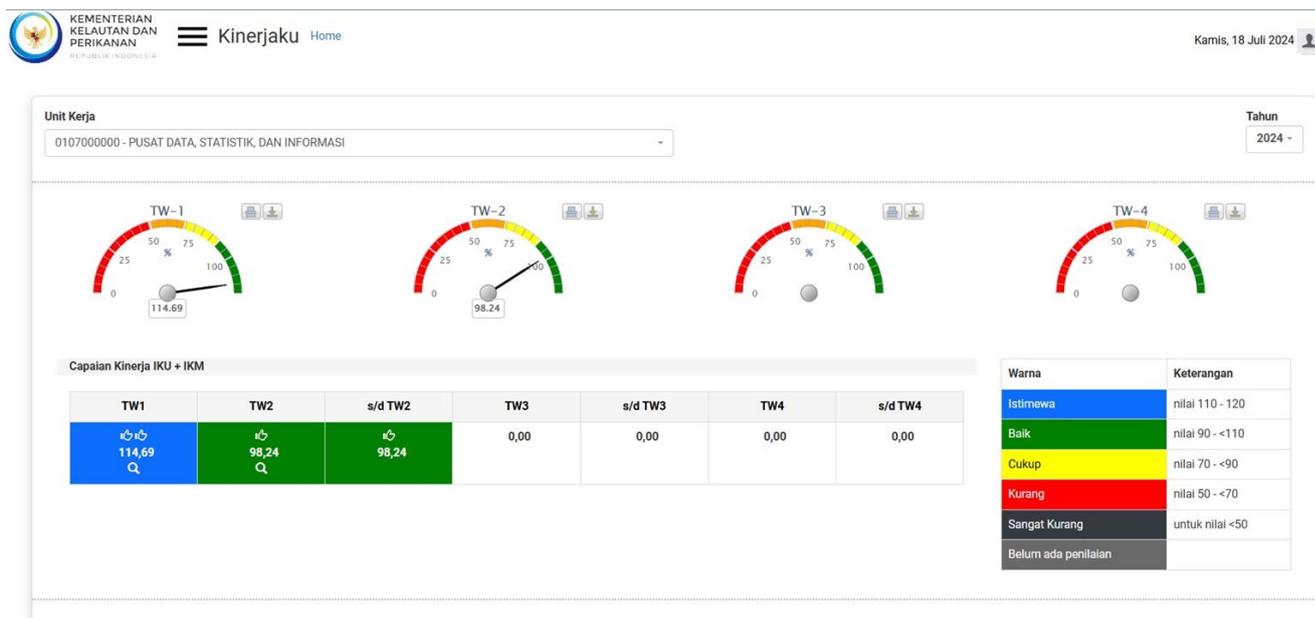
Analisis capaian kinerja tahun 2024 mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pusdatin, antara lain melaksanakan penyediaan data dan statistik, pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), pengembangan sistem informasi, peningkatan kapasitas keamanan infrastruktur informasi teknologi di bidang kelautan dan perikanan, serta pelayanan ketatausahaan dan perizinan terpadu.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Pusat Data, Statistik dan Informasi menggunakan Sistem Aplikasi Perjanjian Kinerja *online* yaitu www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Adapun capaian kinerja IKU Pusdatin periode Triwulan II Tahun 2024 pada aplikasi kinerjaku dengan nilai 98,24%, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Dashboard Skor Kinerja Pusdatin Triwulan II





Gambar 4. Dashboard Skor Kinerja Pusdatin

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian sasaran kegiatan Pusdatin dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini :

Tabel 8. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pusdatin Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi TW II	Capaian (%)
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91		
	2. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Setjen (persen)	94	127,08	135,19
	3. Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5		
	4. Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	76		
	5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,05		
	6. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	76		

Sasaran Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi TW II	Capaian (%)
	7. Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	76		
	8. Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2,5		
	9. Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	70		
	10. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP (nilai)	3		
	11. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai)	2,75		
	12. Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,59		
	13. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	85		
	14. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	88,30	90,78	102,8
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi	15. Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	84		
	16. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (persen)	100	0	0
	17. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100		
	18. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin (indeks)	85	87,09	108,86
	19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	80	100	125
	20. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Pusdatin (persen)	94	133,33	141,84
	21. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95		



3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dalam rangka menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan. Realisasi dan capaian kinerja Pusdatin Triwulan II tahun 2024 berdasarkan PK yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

3.2.1 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk melihat tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Seditjen Eselon II terkait yang menangani data produksi perikanan. Terdapat 3 variabel perhitungan yang digunakan untuk evaluasi TKPD, yaitu :

1. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi (Variabel X₁), Bobot Nilai 30%

Dihitung berdasarkan jumlah KUSUKA yang telah valid pada setiap Unit Kerja Eselon I pada laman Satu Data KKP, dengan rumus :

$$\Sigma \text{KUSUKA} = (\text{Jumlah Pelaku Usaha KP yang telah Valid} / \text{Total Target}) \times 100$$

2. Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (Variabel X₂), Bobot Nilai 40%

Merupakan penilaian atas capaian realisasi pendataan produksi terhadap sampling yang telah ditetapkan pada tahun berjalan serta capaian atas Validasi Nasional pada aplikasi validasi nasional *desktop* dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan.

3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (Variabel X₃), Bobot Nilai 30%

Merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh Unit Data Eselon I. Hasil pengukuran hasil capaian sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I.

Penilaian dihitung terhadap capaian kegiatan berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan dengan rumus :



Nilai per eselon 1 = (jumlah rencana aksi yang diselesaikan/total kegiatan berdasarkan rencana aksi) x 100

Sehingga perhitungan persentase TKPD Kelautan dan Perikanan, dengan rumus :

$$\text{Persentase TKPD} = \text{Variabel } X_1 + \text{Variabel } X_2 + \text{Variabel } X_3$$

Adapun Kriteria penilaian sebagai berikut :

1. Tidak Patuh, jika nilai TKPD 0% - 25%
2. Cukup Patuh, jika nilai TKPD 26% - 50%
3. Patuh, jika nilai TKPD 51% - 75%
4. Sangat Patuh, jika nilai TKPD 76% - 100%

Tabel 9. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan												
Nama IKU	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP (%)												
REALISASI					2024				Renstra 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II 2023-TW II 2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	
65,89	88,50	81,40	87,08	99,01	-	-	-	-	91	-	91	-	

Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP merupakan indikator kinerja yang dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan II tahun 2024 ini belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU TKPD Kelautan dan Perikanan pada Triwulan II Tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Eselon I dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan validasi tingkat provinsi, sebagai bahan Validasi Nasional Semester I Tahun 2024;
2. Melakukan rapat-rapat koordinasi pendataan KUSUKA dengan Unit Kerja Eselon I;

- Melaksanakan Validasi Nasional Angka Produksi Semester II Tahun 2023 pada bulan Mei 2024.



Gambar 5. Kegiatan Validasi Nasional Angka Produksi Semester II Tahun 2023

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

- Mengkoordinasikan pendataan untuk tahun 2024 dan membuat standardisasi pendataan;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Validator Pusat dan Validator Daerah untuk segera memvalidasi data-data yang telah masuk;
- Melakukan rapat-rapat koordinasi capaian produksi kelautan dengan Unit Kerja Eselon I.

3.2.2 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian kegiatan yang memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan oleh Pemerintah ataupun Swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari. IKU ini merupakan indikator yang mengukur pemanfaatan teknologi informasi dengan penilaian aspek keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*.

Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase Unit Kerja Level I – II yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi Manajemen Pengetahuan melalui *platform Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>). Pejabat yang dinilai keaktifannya adalah Pejabat setingkat Eselon II, hal ini disebabkan karena belum semua Unit Kerja menetapkan Tim Kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023.

Adapun komponen penilaian Manajemen Pengetahuan adalah :

1. Keaktifan 100%;
2. Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4; dan
3. Pegawai yang wajib dinilai adalah Eselon II dan Ketua Tim Kerja.

Menindaklanjuti pengukuran capaian IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Lingkup Setjen Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen (%)											
REALISASI					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
91,14	96,06	95,59	98,32	112,59	94	127,08	135,19	27,77	94	119,77	95	135,12

Pada tabel dapat dilihat bahwa realisasi Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen pada Triwulan II Tahun 2024 adalah 127,08%, yang menunjukkan bahwa capaian sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 94%. Hal ini dapat dicapai karena sebagian besar Pejabat di Level I dan II aktif dalam melakukan *sharing* informasi capaian kinerja masing-masing unit kerja. Jika dibandingkan dengan realisasi Manajemen Pengetahuan Triwulan II tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar 27,77%.

CAPAIAN SETJEN



Gambar 6. Grafik Capaian Manajemen Pengetahuan per Satuan Kerja Setjen Triwulan II Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian tertinggi Triwulan II Tahun 2024 dicapai oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; Biro Hukum; Biro Keuangan; Biro Perencanaan; Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa; LPMUKP; dan Pusdatin, dengan capaian 133,33%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan indikator kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen adalah :

1. Sosialisasi penggunaan portal *Collaboration Office* kepada Unit Kerja di lingkungan KKP;
2. Melakukan koordinasi dengan PIC yang telah ditunjuk oleh masing-masing Unit Eselon I di lingkungan KKP;
3. Melakukan monitoring keaktifan para pejabat dalam sharing informasi; dan
4. Menyampaikan capaian sementara nilai MP melalui Nota dinas dan Memorandum kepada seluruh unit kerja.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain :

1. Melakukan sosialisasi *Portal Collaboration Office*;
2. Melakukan koordinasi dengan PIC melalui *whatsapp group*;
3. Melakukan rapat monitoring dengan PIC Unit Kerja Eselon I dan II; dan



4. Monitoring *Portal Collaboration Office* Manajemen Pengetahuan.

3.2.3 Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi

Index Layanan Aplikasi Sistem Informasi merupakan penilaian atas layanan aplikasi yang diberikan oleh Pusdatin kepada seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP, baik pusat maupun di unit pelaksana teknis di daerah.

Survei dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner kepada Unit Eselon I di lingkungan KKP. Pengukuran dengan Skala Likert, dengan kriteria hasil sebagai berikut :

Nilai 4,5 – 5 : Memuaskan

Nilai 4 – 4,5 : Sangat Baik

Nilai 3 – 3,9 : Baik

Nilai 2 – 2,9 : Cukup

Nilai < 1,9 : Kurang

Tabel 11. Target dan Realisasi IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	3,5	-

IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan II Tahun 2024 ini belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan. Sebagai informasi, IKU ini juga baru dilaksanakan tahun 2023.

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan II untuk mendukung indikator kinerja ini adalah :

1. Melakukan penyempurnaan *Portal Collaboration Office* sebagai sistem informasi yang terintegrasi di lingkungan KKP;

2. Menyiapkan kuesioner sebagai instrumen survei yang akan disampaikan kepada seluruh Unit Kerja Eselon I; dan
3. Melakukan survei layanan aplikasi di lingkungan KKP.

3.2.4 Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim

Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (PKM) merupakan penilaian atas kinerja dan implementasi layanan sistem informasi yang diberikan oleh Pusdatin kepada pimpinan KKP dan Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP dalam menyajikan data secara *real time* dalam bentuk *dashboard* pemantauan di dalam ruang *command center*.

Dalam rangka mengevaluasi hasil kinerja Pusdatin sebagai penyedia layanan sistem informasi pada *command center* KKP, maka dibutuhkan survei kepada pengguna atau *user* di Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP maupun K/L yang telah memanfaatkan layanan sistem informasi. Selain itu juga dilakukan penilaian atas capaian rencana aksi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Pusat Kontrol Maritim selama 1 tahun.

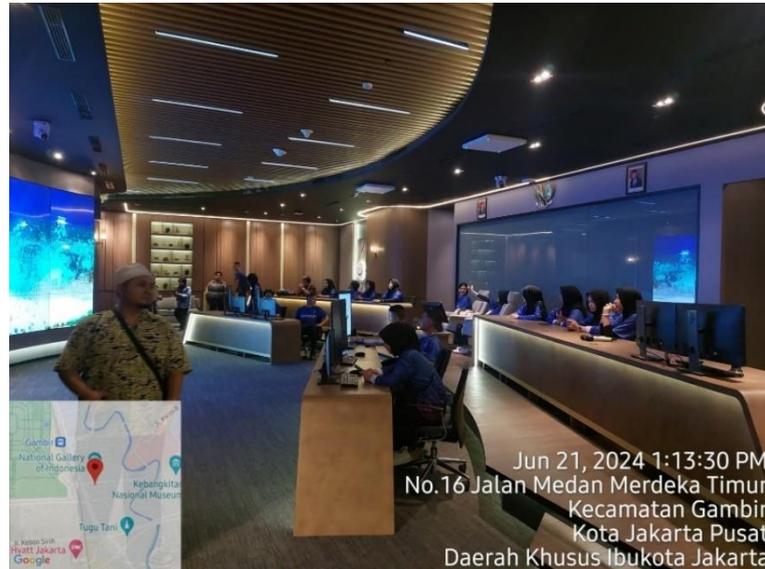
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU Persentase Layanan Sistem Informasi

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	77	-

IKU Persentase Layanan Sistem Informasi PKM merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan II Tahun 2024 belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan II Tahun 2024 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Melakukan koordinasi antara Pusdatin dan Unit Kerja Eselon I dalam pengelolaan *command center* KKP;
2. Melakukan *monitoring* operasional PKM; dan
3. Melakukan survei kepada seluruh unit kerja Eselon I dan Kementerian atau Lembaga terkait.



Gambar 7. koordinasi antara Pusdatin dan Unit Kerja Eselon I

Kegiatan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Melakukan koordinasi antara Pusdatin dan Unit Kerja Eselon I dalam pengelolaan *command center* KKP;
2. Melakukan *monitoring* operasional PKM; dan
3. Melakukan survei kepada seluruh unit kerja Eselon I dan Kementerian atau Lembaga terkait.

3.2.5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diamanatkan kepada seluruh Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi SPBE secara berkala. Evaluasi tersebut merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga akan menghasilkan nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU Indeks SPBE KKP Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP												
Nama IKU	Indeks SPBE KKP												
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	
3,57	4,21	2,75	3,3	3,58	-	-	-	-	3,05	-	3,10	-	

IKU Indeks SPBE KKP merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan II Tahun 2024 belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan II Tahun 2024 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Menyiapkan data dukung penilaian SPBE pada 4 domain, yaitu: Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan Domain Layanan;
2. Melakukan rapat pembahasan domain tata Kelola SPBE;
3. Mengikuti sosialisasi Sistem Informasi Arsitektur SPBE (SIA SPBE) oleh Kementerian PAN RB;
4. Melakukan *review* dan evaluasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP) dengan Kementerian Kominfo;
5. Melakukan koordinasi tata kelola dan manajemen SPBE dengan *Center for Study of Governance and Administrative Reform* (CSGAR) Universitas Indonesia;
6. Melakukan koordinasi awal penyusunan *draft* Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) SPBE dengan BSSN;



- Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan manajemen data SPBE dengan Bappenas.

Tindak lanjut pelaksanaan pada triwulan selanjutnya adalah :

- Melaksanakan forum kolaborasi SPBE di lingkungan KKP;
- Melakukan Audit TIK di lingkungan KKP;
- Menyampaikan Draft Keputusan Menteri Kelautan dan dan Perikanan tentang Pedoman Manajemen SPBE, Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- Mengikuti Sosialisasi Penilaian Indeks SPBE Tahun 2024 yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.

3.2.6 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP

Berdasarkan surat dari Kementerian PAN RB Nomor B/51/S.OO.00.05/2024 tanggal 29 Januari 2024, bahwa sebenarnya pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) ditiadakan, dan kegiatan tersebut berganti menjadi Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI). Untuk penyelenggaraan KIPP lingkup KKP akan tetap dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan KIPP Tahun 2023 namun akan dibuat perbedaan pada syarat penyelenggaraan inovasi minimal 1 tahun dan tidak harus layanan publik ke masyarakat.

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP												
Nama IKU	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP												
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	
-	-	-	-	82,93	-	-	-	-	76	-	77	-	

IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan II Tahun 2024 belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Kegiatan ini akan mulai dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Oktober/November 2024.

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan II Tahun 2024 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Unit Kerja Eselon I lain untuk penyusunan Surat Keputusan tentang Penilai Internal Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2024;
2. Melakukan sosialisasi dalam rangka persiapan KIPP, dengan mengundang Kementerian PAN RB, serta innovator dari BPPMHKP, DJPRL dan DJPT;
3. Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik KKP dan Tim Penilaian Eselon



Gambar 8. Inovasi Pelayanan Publik KKP

Kegiatan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Pusdatin akan membuat aplikasi penilaian untuk mempermudah proses penilaian serupa dengan sinovik;
2. Melakukan penilaian terhadap proposal yang diterima oleh tim penilai KKP;
3. Memberikan penghargaan kepada inovasi yang menjadi top 10 inovasi pelayanan publik; dan
4. Melakukan evaluasi kegiatan atas rangkaian penilaian KIPP.

3.2.7 Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi

Persentase pemenuhan data citra satelit dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang terpenuhi merupakan penilaian atas layanan yang diberikan oleh Pusat Data, Statistik, dan Informasi dan diturunkan kepada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) kepada seluruh stakeholders, baik internal maupun eksternal. Layanan yang diberikan terdiri dari :

1. Penyediaan Data Citra Satelit; dan
2. Penyediaan Informasi Geospasial.

Memfasilitasi verifikasi dan validasi data-data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang disediakan oleh BPISDKP, untuk memastikan bahwa data-data tersebut telah memenuhi kriteria verifikasi dan validasi yang sesuai serta telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh stakeholder. Mengingat tugas dan fungsi BPISDKP sebagai balai yang mengelola informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan, verifikasi dan validasi data perlu dilakukan untuk menjamin kualitas dan keakuratan data. Indikator kinerja tersebut diukur melalui jenis data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan standar data geospasial yang telah disahkan oleh Kepala BPISDKP, serta dimanfaatkan oleh *stakeholder*. Pada tahun 2023, IKU ini memiliki target 2 jenis data dan telah tercapai sesuai target. Untuk tahun 2024, target tidak hanya difokuskan pada jumlah jenis data yang dihasilkan, namun juga pada pemanfaatan data tersebut. Target yang diharapkan pada tahun 2024 adalah 100% data geospasial yang dihasilkan BPISDKP telah terverifikasi, tervalidasi dan termanfaatkan oleh *stakeholder*.

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II	Target 2024	% Capaian Thdp	Target 2025	% Capaian Thdp

								2023-2024		Target 2024		Target 2025
-	-	-	-	100	-	-	-	-	76	-	77	-

IKU ini merupakan indikator kinerja yang dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan II Tahun 2024 ini belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan. Hingga Juni 2024, telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU yaitu koordinasi tim teknis dan analisa data. Tidak ada kendala berarti yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II

Kegiatan selanjutnya untuk mendukung Indikator ini adalah :

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan BPISDKP Triwulan II tahun 2024;
2. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan BPISDKP periode triwulan selanjutnya.

3.2.8 Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP

Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP merupakan alat bantu untuk mengukur kematangan keamanan siber organisasi. Diharapkan organisasi dapat melakukan peningkatan pengelolaan keamanan siber serta memastikan pengelolaan tersebut berjalan optimal dan berfungsi secara menyeluruh.

Evaluasi Tingkat Kematangan Keamanan Siber akan menghasilkan nilai indeks yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) di instansi KKP berdasarkan tanggapan atas pertanyaan dari setiap quesioner yang digunakan.

Kuesioner merupakan instrument pengukuran maturitas penanganan siber dan sandi untuk memetakan tingkat kesiapan organisasi terhadap kemampuan penanganan dan menanggapi insiden keamanan siber.

Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dilakukan terhadap 5 aspek :

1. Tata Kelola;
2. Identifikasi;
3. Proteksi;
4. Deteksi; dan
5. Respon.

Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Apabila BSSN tidak melakukan penilaian, maka hasil



capaian menggunakan hasil dari penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal KKP.

Tabel 16. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	-	-	3,08	-	-	-	-	2,5	-	2,6	-

IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan II Tahun 2024 belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Tata Kelola	Identifikasi	Proteksi	Deteksi	Respon					
2.97	3.64	3.06	3.49	3.83					
Kesadaran	2.71	Manajemen Aset	3.25	Jaringan	3.71	Perubahan	4.67	Penahanan	3.67
Audit	2.75	Inventaris	4.20	Aplikasi	2.80	Monitor	3.50	Penanggulangan	3.80
Kontrol	3.61	Manajemen Risiko	3.46	Pengguna	1.67	Peringatan	3.25	Pemulihan	4.00
Pemenuhan	1.68	Prioritas	4.20	Manajemen Identitas dan Aset	3.46	Pemberitahuan	3.40	Kegiatan Paska Insiden	4.25
Kebijakan	2.90	Pelaporan	4.00	Cloud	3.00	Intelijen	2.73	Pelaporan	3.43
Proses	4.14	Klasifikasi	2.75	Data	3.71	Pelaporan	3.40		

Hasil penilaian bssn di bulan mei BSSN telah melakukan Penilaian dan Verifikasi Tingkat Kematangan Keamanan Siber (Cyber Security Maturity) Tahun 2024 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 27 – 31 Mei 2024, berdasarkan Surat Dinas Kepala BSSN Nomor 94/BSSN/D3/PS.02.02/01/2024 perihal Pelaksanaan.



Gambar 9.
Penilaian dan Verifikasi Cyber Security Maturity (CSM) 2024

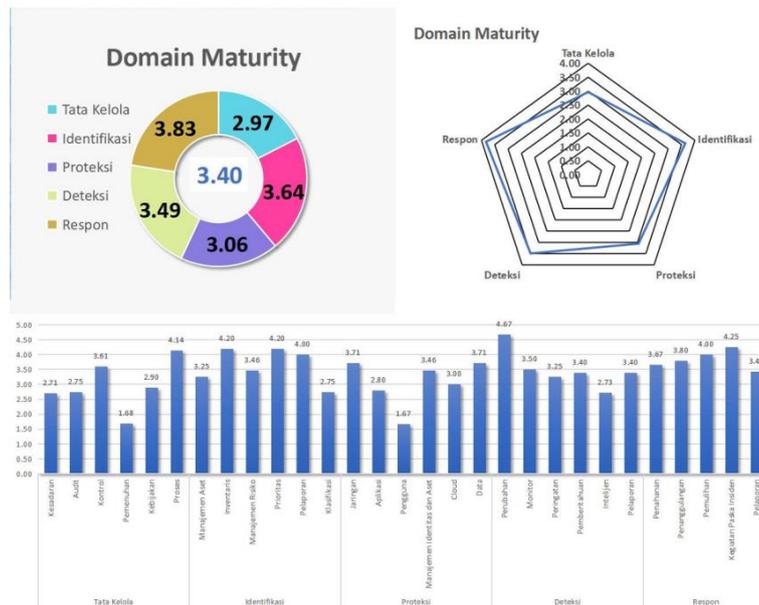
Dari hasil verifikasi oleh Tim Verifikator BSSN, Tingkat Kematangan Keamanan Siber Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 mendapatkan indeks sebesar 3,40. Sehingga dengan Indeks Kematangan tersebut dapat ditentukan bahwa level kematangannya ada pada tingkat kematangan level 3. Dengan demikian, secara kualitatif dapat digambarkan bahwa penerapan keamanan siber yang prosesnya sudah terorganisir dengan jelas, bersifat formal, dilakukan secara berulang, dilakukan reviu berkala, dan konsisten. Namun penerapan perubahan belum dilakukan secara berkelanjutan dan belum menjadi membudaya dan terintegrasi serta menerapkan otomatisasi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU ini adalah:

1. Melaksanakan rapat koordinasi penyiapan dokumen tingkat kematangan keamanan siber dengan BSSN; dan
2. Pelaksanaan penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP oleh BSSN dilakukan pada tanggal 27 - 31 Mei 2024.

Tindaklanjut pelaksanaan IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP pada tahun selanjutnya, yaitu:

1. Melakukan evaluasi hasil assesmen Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP yang dilakukan oleh BSSN; dan
2. Melakukan koordinasi dalam rangka perbaikan Tingkat Kematangan



3.2.9 Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan

Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan merupakan alat bantu untuk mengukur penyelenggaraan Satu Data Kelautan dan Perikanan mendukung Satu Data Indonesia (SDI) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Evaluasi Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan akan menghasilkan nilai yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) penyelenggaraan Satu Data Kelautan dan Perikanan mendukung Satu Data Indonesia di instansi KKP berdasarkan jawaban atas pertanyaan dalam Lembar Kerja SDI.

Pengukuran Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap aspek-aspek berikut :

1. Pembiayaan;
2. Kelembagaan;
3. SDM;

4. Teknologi Informasi;
5. Penyelenggaraan;
6. Koordinasi;
7. Pengelolaan dan Pemanfaatan; dan
8. Regulasi.

Penilaian Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan mendukung Satu Data Indonesia dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Apabila Kementerian PPN/Bappenas tidak melakukan penilaian, maka hasil capaian menggunakan hasil dari penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal KKP.

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	-	-	89,17	-	-	-	-	70	-	71	-

IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan baru dilaksanakan pada tahun 2023, dan merupakan IKU yang dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan II belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Untuk mendukung IKU tersebut, Pusdatin diundang pada kegiatan pendampingan pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia. Yaitu penyusunan standar data dan metadata data prioritas lingkup KKP.

Sekretariat Satu Data Indonesia akan melakukan Evaluasi Pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah melalui penghitungan Indeks SDI. Dalam hal ini, terdapat beberapa Domain, Aspek, Indikator penilaian Evaluasi pelaksanaan SDI yang akan dipergunakan dalam menyusun Indeks SDI. KKP telah berpartisipasi dalam pengisian kuesioner *Analytical Hierarchy Process* (AHP) indeks Satu Data



Indonesia. Pengisian kuesioner dilakukan melalui link berikut <https://link.bappenas.go.id/KuesionerAHPIndeksSDI>.

3.2.10 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP

Dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dijelaskan bahwa arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE diterapkan dalam 3 (tiga) ruang lingkup, yakni pada lingkup Nasional, lingkup Instansi Pusat, dan lingkup Pemerintah Daerah. Sebagaimana diketahui, SPBE bukan hanya merupakan IKU KKP dan Pusdatin, tapi juga menjadi bagian penting dalam program Reformasi Birokrasi (RB). Pada tahun 2023, Nilai Tingkat Kebijakan Arsitektur SPBE yang digunakan untuk RB adalah nilai Indeks Indikator 1, yaitu “Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah”. Indikator 1 ini kemudian mendapatkan nilai 2 karena KKP sudah memiliki kebijakan Arsitektur SPBE, yaitu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2024.

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP												
Nama IKU	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP												
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	
-	-	-	-	4,8	-	-	-	-	3	-	4	-	

Periode penghitungan capaian IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP adalah periode tahunan, sehingga pada Triwulan II ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan II Tahun 2024 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Melaksanakan rapat proses bisnis level 1 dengan unit kerja terkait;
2. Melakukan sosialisasi dan penginputan Sistem Informasi Arsitektur SPBE V2 KKP didampingi oleh Kementerian PANRB.

Kegiatan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah melakukan penginputan Sistem Informasi Arsitektur SPBE V2 KKP dengan seluruh unit kerja di lingkungan KKP.

3.2.11 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP

Pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Nasional melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus didukung dengan penggunaan data dan informasi statistik. Penggunaan data dan informasi statistik digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah. Data dan informasi statistik tersebut dikelola sesuai prinsip satu data indonesia melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi.

Penyediaan data dan informasi statistik dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, meliputi Instansi Pusat, Pemerintahan Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan masyarakat dalam kerangka penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN). Menurut pemanfaatannya, statistik dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar, Statistik Sektoral, dan statistik khusus. Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki fungsi penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dilaksanakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan satu data indonesia dan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) dari penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS).



EPSS sendiri merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk :

1. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	-	-	2,68	-	-	-	-	2,75	-	3	-

Periode penghitungan capaian IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP adalah periode tahunan, sehingga pada Triwulan II ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Kegiatan EPSS KKP ini merupakan hasil penilaian eksternal yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan baru dilaksanakan oleh KKP di tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar 2,68, dimana kegiatan statistik sektoral yang dinilai adalah :

1. Pendataan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
2. Pendataan Produksi kelautan dan Perikanan.
3. Pada 25 Juni 2024 telah dilakukan penilaian EPSS oleh Tim Pembina BPS dan hasilnya akan disampaikan pada Oktober 2024.

Kegiatan yang dinilai pada Tahun 2024 adalah:

1. Pendataan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
2. Pendataan Produksi Budi daya.

Beberapa perbaikan telah dilakukan untuk penilaian Tahun 2024, yaitu:

1. Domain Kualitas Data untuk Indikator Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap Pengguna berupa:
 - a. SOP Permintaan Data
 - b. Penyusunan kuesioner kepuasan terhadap data sebagaimana pada link berikut : <https://forms.office.com/r/1Gd16YVD3k>.
2. Domain Statistik Nasional Aspek Pemanfaatan Data Statistik berupa:
 - a. Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan Kriteria berupa: Penggunaan data NTN, NTPi, PDB Perikanan, dan data ekspor yang merupakan statistik dasar perhitungan dari BPS, sebagai tolok ukur capaian kinerja dalam rencana strategis (Renstra) KKP 2020 - 2024 yang tertuang dalam PermenKP no 17 tahun 2020.
 - b. Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektorial untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan Kriteria berupa: Penggunaan data statistik sektorial dalam sasaran strategis (SS) salah satunya pada SS-7 "industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing" dengan indikator kinerja: produksi perikanan, produksi garam nasional, dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP skala kecil, dan kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan pada Renstra KKP 2020 - 2024

3.2.12 Indeks Pelayanan Publik KKP

Pelayanan merupakan bagian integral dan strategis bagi pengembangan tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan serta pemenuhan pelayanan publik. Keberhasilan birokrasi dan pelayanan yang berkualitas merupakan harapan masyarakat. Kesadaran Unit Pelayanan Publik dalam mewujudkan Pelayanan Prima agar masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, salah satunya diwujudkan dengan melakukan perbaikan atas kualitas pelayanan publik melalui kegiatan



Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada Pasal 7 ayat (2) huruf b juga mengamanatkan kepada Penanggung jawab untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Merujuk pada ketentuan tersebut, perbaikan atas kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari seluruh instansi penyelenggara pelayanan. Dengan demikian, kebutuhan akan pelayanan yang berkualitas menjadi prioritas untuk diwujudkan. PEKPPP merupakan salah satu cara yang dapat digunakan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan PEKPPP telah dilakukan setiap tahun yang menghasilkan nilai IPP. Dari kegiatan yang telah dilakukan secara periodik itu, kegiatan pemantauan atas hasil evaluasi belum menjadi bagian yang penting untuk dilakukan dan hanya berfokus pada kegiatan evaluasi. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kegiatan pemantauan agar proses PEKPPP seluruhnya dapat berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan PEKPPP dapat dilakukan secara langsung di lokasi Unit Lokus Evaluasi (ULE) maupun secara *daring*.

Tabel 20. Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik KKP Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Indeks Pelayanan Publik KKP											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
4,18	4,33	4,58	4,58	4,64	-	-	-	-	4,59	-	4,65	-

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, realisasi IPP KKP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Periode penghitungan capaian IKU IPP KKP

adalah periode tahunan, sehingga pada Triwulan II ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKU ini adalah :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam bentuk pendampingan pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh eksternal;
2. Menindaklanjuti saran/rekomendasi hasil PEKPPP Nasional dari Kementerian PANRB untuk Unit Lokus Evaluasi tahun 2024;

Tindak lanjut yang akan dilakukan selanjutnya adalah:

1. Melakukan kunjungan evaluasi langsung ke lokus penilaian yaitu BPSPL Pontianak bersama dengan Kementerian PANRB;
2. Melaksanakan rekomendasi yang akan diberikan oleh Kementerian PANRB;
3. Melaporkan hasil evaluasi PEKPPP kepada Sekretaris Jenderal.

3.2.13 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP

Sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik, mulai tahun 2022 Ombudsman RI melakukan penyempurnaan lagi atas metode penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian dilakukan tidak hanya atas ketersediaan standar pelayanan dan penilaian persepsi maladministrasi saja, namun juga mengukur kompetensi penyelenggara layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, serta pengawasan dan pengelolaan pengaduan. Maksud dari penilaian ini yaitu mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengaduan. Semua penilaian tersebut, menjadi komponen dari Opini Pengawasan Ombudsman RI terhadap Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Perubahan ini diharapkan menjadi lebih komprehensif lagi dalam menakar mutu pelayanan publik: dimensi input dan proses (*service manufacturing*) hingga *output* dan dampak (*impactful public service*).

Kemudian pada tahun 2023 kembali dilakukan penyempurnaan dan pengembangan variabel serta indikator penilaian yaitu: penilaian pada Kementerian dan Lembaga ditambahkan variabel Indeks Kepuasan Masyarakat



sedangkan penilaian pada Pemerintah Daerah ditambahkan Standar Pelayanan Minimal. Dimana hasil penilaian juga disinergikan dengan pelaksanaan produk pengawasan Ombudsman yaitu Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara layanan sebagai upaya nyata perbaikan pelayanan publik.

Tabel 21. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	86,66	89,37	88,86	-	-	-	-	85	-	86	-

Periode penghitungan capaian IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP adalah periode tahunan, sehingga pada Triwulan II ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan IKU ini adalah:

1. Melaksanakan sosialisasi persiapan pelaksanaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024;
2. Menyampaikan list data dukung penilaian yang perlu disiapkan oleh setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) Lingkup Pusat;
3. Melaksanakan bimbingan teknis terkait Peningkatan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan dengan narasumber Ombudsman RI dan Inspektorat Jenderal KKP;
4. Melaksanakan bimbingan teknis terkait Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dan Penyusunan Standar Pelayanan Publik dengan narasumber Kementerian PANRB dan Inspektorat Jenderal KKP;
5. Memberikan apresiasi kepada pimpinan dan pegawai yang bertugas pada unit yang menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian



kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan kompetensi.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan IKU ini adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dengan Ombudsman RI guna penentuan UPP yang akan menjadi lokus tahun 2024 dan kesiapan pemenuhan data dukungannya;
2. Menyusun *checklist* pemenuhan data dukung penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik per UPP per produk layanan guna memudahkan pemantauan progres;
3. Melakukan koordinasi dengan UPP Lokus Penilaian dalam rangka pengusulan dan penentuan responden internal yang akan dilakukan wawancara oleh Tim Ombudsman RI serta pembagian jadwal pelaksanaannya; dan
4. Menyusun ringkasan bahan *sharing session* materi wawancara penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dalam bentuk kisi-kisi pertanyaan beserta jawabannya untuk memudahkan responden internal KKP mempersiapkan diri.

3.2.14 Survei Kepuasan Masyarakat KKP

Dalam rangka mengetahui dan mengukur sejauh mana kualitas pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan, yaitu dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara. Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan



masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkup KKP.

IKU SKM merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode triwulanan, dan baru dilaksanakan di tahun 2023. Berikut ini adalah hasil penyelenggaraan SKM KKP periode Triwulan II Tahun 2024 per Unit Eselon I melalui *tools* SKM :

Unit Eselon I	UPP Aktif	UPP Melakukan SKM	Layanan dilaksanakan SKM	Jumlah Responden	Nilai SKM
DJPKRL	12	11	13	483	92,71
DJPT	26	26	55	5.407	90,61
DJPB	18	18	10	770	91,67
DJPDSPKP	5	5	10	325	87,86
DJPSDKP	15	15	5	1.286	91,32
BPPSDMKP	17	15	38	2.679	88,49
BPPMHKP	47	47	14	2.371	93,48
SETJEN (PTSA)	1	1	23	218	87,90
KKP	141	138	155	13.539	90,78 Sangat Baik

Rincian nilai per Unsur Pelayanan SKM KKP Triwulan II Tahun 2024 yaitu :

Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1 - Persyaratan Layanan	3,682
U2 - Kemudahan Prosedur	3,655
U3 - Waktu Penyelesaian	3,619
U4 - Kesesuaian Biaya	3,630
U5 - Kesesuaian Produk	3,627
U6 - Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas	3,598
U7 - Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas	3,632
U8 - Layanan Konsultasi	3,624
U9 - Kualitas Isi/Sarana Prasarana	3,616

Tabel berikut adalah hasil capaian realisasi IKU SKM KKP Triwulan II Tahun 2024:

Tabel 22. Target dan Realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat KKP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Survei Kepuasan Masyarakat KKP											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II	Target 2024	% Capaian Thdp	Target 2025	% Capaian Thdp

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Survei Kepuasan Masyarakat KKP											
Realisasi				2024				Renstra 2020-2024				
								2023-2024	Target 2024		Target 2025	
-	-	-	-	91,01	88,30	90,78	102,81	0.26	88,30	102,81	89	102

Pada tabel terlihat bahwa realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat KKP ini adalah 90,78 yang artinya capaiannya sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 88,30. Apabila dicerminkan terhadap target tahun 2024, realisasi ini telah mencapai target 102,81%.

Analisa atas hasil SKMU KKP Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah responden sebanyak 13.539 dengan hasil SKM 90,78 kategori mutu pelayanan “Sangat Baik”. Jumlah responden meningkat sebanyak 14% dibandingkan periode pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2024, dimana kenaikan terbanyak adalah pada responden Ditjen. Perikanan Tangkap dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDMKP yang juga diikuti dengan peningkatan jumlah layanan yang dilakukan pengambilan SKM;
2. Presentase UPP yang melaksanakan SKM Triwulan II Tahun 2024 sebesar 98%, yaitu 138 (seratus tiga puluh delapan) UPP baik lingkup Pusat maupun Daerah. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 3% apabila dibandingkan dengan hasil SKM Triwulan I Tahun 2024;
3. Jumlah layanan yang dilakukan SKM pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) layanan, dengan layanan terbanyak pada Ditjen. Perikanan Tangkap sebanyak 55 layanan;
4. Terdapat 1 (satu) UPP dengan responden tunggal sehingga belum memenuhi kaidah kecukupan sampel atas populasi pelayanan yang diselenggarakan, yaitu pada Stasiun KIPM Bima; dan
5. Seluruh unsur pelayanan mendapatkan Nilai rata-rata (NRR) lebih dari 3 (tiga) dengan rata-rata keseluruhan 3,631 dan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90,78. Sementara itu, 3 (tiga) unsur pelayanan dengan nilai terendah yang perlu menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti,



yaitu U3 - Waktu Penyelesaian, U6 - Kecepatan Respon atau Kompetensi Petugas, dan U9 - Kualitas Isi/Sarana Prasarana.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Implementasi sistem informasi Si-Susan sebagai tools SKM secara online untuk pelaksanaan SKM;
2. Melakukan validasi hasil responden yang dihimpun melalui tools aplikasi Si-Susan bersama Sekretariat Eselon I;



Gambar 10. Zoom Validasi SKM TW II

3. Membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Unit Eselon I penyelenggara SKM untuk mendukung pelaksanaan SKM;
4. Menghadiri kegiatan koordinasi dan/atau *coaching clinic* pelayanan publik yang diselenggarakan Kementerian PANRB dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik



Gambar 11.
Optimalisasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat_KemenPANRB

Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan untuk mendukung IKU SKM KKP ini adalah:

1. Berkoordinasi dengan Sekretariat Eselon I untuk menyampaikan dan menghimbau masing-masing UPP untuk dapat mempertahankan dan/atau memperhatikan kecukupan jumlah responden per UPP, dengan mengacu tabel sampel dari Krejcie and Morgan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
2. Menyampaikan dan menghimbau pentingnya untuk menindaklanjuti hasil validasi dengan penyusunan dan penyampaian laporan, inventarisasi saran dan masukan, penyusunan rencana tindak lanjut prioritas perbaikan, serta publikasi atas hasil SKM Triwulan II Tahun 2024 melalui media elektronik dan nonelektronik sesuai ketersediaan sarana prasarana yang ada;
3. Menyampaikan dan menghimbau agar UPP memperhatikan kesesuaian format penyusunan laporan pelaksanaan SKM per UPP mengacu pada Pedoman Kementerian PANRB yang dapat diunduh melalui menu download pada Tools SKM; dan
4. Menghimpun data hasil pelaksanaan SKM per UPP periode triwulan III dan IV tahun 2023 sebagai bahan pelaporan kepada Kementerian PANRB.

3.2.15 Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan pengetahuan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan pelaksanaan SAKIP lingkup Pusdatin adalah untuk :

1. Mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP di Pusdatin



2. Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan bersifat orientasi;
3. Memperoleh informasi tentang implemtasi SAKIP lingkup Pusdatin;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi lingkup Pusdatin; dan
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Tabel 23. Target dan Realisasi IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	-	-	87,15	-	-	-	-	84	-	85	-

Periode penghitungan capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin adalah periode tahunan, sehingga pada Triwulan II ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung IKU antara lain adalah :

1. Menyiapkan seluruh dokumen pendukung PM SAKIP, yang terdiri dari :
 - a. Perjanjian Kinerja;
 - b. Manual IKU;
 - c. Rincian Target IKU;
 - d. Rencana Aksi;
 - e. LKJ Level 2;
 - f. Data dukung LKJ.
2. Menginput perencanaan dan hasil kinerja satuan kerja di aplikasi KINERJAKU Triwulan II tahun 2024;
3. Menerapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk monitoring kinerja individu;



4. Rapat Tim Pengelolaan Kinerja untuk memantau target, realisasi, capaian dan data dukung yang diinput pada aplikasi Kinerjaku Triwulan II;
5. Meng-upload dokumen kelengkapan SAKIP Pusdatin ke dalam google drive, <http://bit.ly/DokumenSAKIPSetjen>. Dan <http://bit.ly/DokumenSAKIP Pusdatin>.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mendukung IKU ini adalah :

1. Menyiapkan data capaian yang dihitung secara triwulanan;
2. Menyiapkan Laporan Kinerja triwulanan agar dapat disampaikan tepat waktu dan disusun sesuai dengan hasil review oleh Tim SAKIP KKP.

3.2.16 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Data, Statistik, dan Informasi adalah sebagaimana tercantum Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2024, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

IKU ini merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode semesteran, sehingga pada Triwulan II Tahun 2024 atau Semester I (Januari s.d Juni 2024) belum terealisasi.



Tabel 24. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW I 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	-	100	100	100	0	0	0	100	0	100	0

IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Data, Statistik, dan Informasi merupakan IKU yang pengukurannya dilakukan secara semesteran, dan pada Triwulan II ini telah tersusun

Keputusan Menteri tentang Data Induk Penyakit Ikan, dimana pokok materi muatannya adalah menetapkan struktur basis data dan data induk penyakit ikan; dan struktur basis data dan data induk penyakit ikan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan database penyakit ikan.

Telah diselenggarakan rapat pembahasan pada tanggal 22 April 2024, berdasarkan undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal, Nomor B.628/SJ.4/TU.330/IV/2024, tanggal 16 April 2024, yang dihadiri perwakilan seluruh unit kerja eselon I yaitu Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, Ditjen Perikanan Budi Daya, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat BPPSDMKP, Pusdatin, dan Biro Hukum. Biro Hukum telah menyampaikan permintaan agar terhadap Rancangan Keputusan Menteri tersebut dapat dilakukan penyempurnaan sesuai hasil rapat pembahasan melalui memorandum Kepala Biro Hukum, Nomor 710/SJ.4/HK.160/IV/2024, tanggal 24 April 2024, dengan hasil terhadap Rancangan Keputusan Menteri telah dilakukan penyempurnaan dan disampaikan kembali oleh Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi melalui memorandum, Nomor 1574/SJ.7/HK.160/IV/2024, tanggal 30 April 2024.



Berdasarkan hasil pencermatan Biro Hukum, terdapat beberapa item dalam Lampiran tabel huruf B Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Struktur Basis Data dan Data Induk Penyakit Ikan yang tidak digunakan pada tabel huruf C sehingga disarankan untuk dihapus yaitu: a. wilayah sebaran; b. kode wilayah sebaran; c. negara asal sebaran; dan d. kode negara asal sebaran. Saat ini sedang dalam proses harmonisasi oleh Biro Hukum. Sehingga pada Triwulan II, belum tercapai untuk pengesahan/penerbitan Keputusan Menteri tentang Data Induk Penyakit Ikan.

3.2.17 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin

Sebagai kontrol dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit per semester setiap tahunnya. Teknik menghitung indikator ini yaitu :

1. Menghitung tingkat penyesuaian/koreksi atas rekomendasi hasil *review* Itjen terhadap Laporan Keuangan (LK) Semester II tahun berjalan (dengan batas waktu penyelesaian bulan September) dan LK tahunan/n-1 (dengan batas waktu penyelesaian bulan Februari n+1), baik jumlah kejadian maupun nilai uang;
2. Menghitung tingkat penyesuaian/koreksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap LK tahunan/n-1 (dengan batas waktu penyelesaian 7 hari kerja setelah diterimanya CATATAN HASIL PEMERIKSAAN), baik jumlah kejadian maupun nilai uang; dan
3. Bobot jumlah kejadian dengan nilai uang adalah 50%:50%.

Tabel 25. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	-	100	-

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusdatin merupakan indikator kinerja yang dihitung periode tahunan, sehingga pada triwulan II tahun 2024 ini belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk pencapaian IKU ini adalah:

1. Menyiapkan data dukung dalam rangka audit yang dilakukan oleh BPK Tahun 2024;
2. Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk menindaklanjuti temuan BPK, dengan melengkapi data dukung rekomendasi hasil audit;
3. Berkoordinasi dengan Biro Keuangan sebagai Tim Tindaklanjut Lingkup Setjen;
4. Monitoring kegiatan penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusdatin tahun sebelumnya;
5. Peningkatan kepatuhan satker mengirim laporan bulan secara tepat waktu secara online.

3.2.18 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin

Indeks profesionalitas (IP) ASN merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Komponen IKU IP ASN terdiri dari:

1. **Kualifikasi (bobot 25%)** yaitu sesuai dengan pendidikan terakhir dari masing-masing pegawai:
2. **Kompetensi (bobot 40%)** terdiri dari:
 - a. Diklatpim, sesuai dengan jenjang jabatan struktural, misalkan pejabat eselon III belum melaksanakan diklatpim Tk. III, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan diklatpim sesuai jenjang strukturalnya maka nilainya 15 (lima belas);
 - b. Diklat Fungsional atau Teknis, sesuai dengan jabatan fungsionalnya, misalkan seorang pejabat fungsional belum pernah sama sekali



- melaksanakan diklat fungsional, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan sekali saja diklat fungsional, maka nilainya 15 (lima belas);
- c. Diklat 20 JP (Jam Pelajaran) merupakan diklat yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai dengan total diklat tersebut minimal 20 JP dalam setiap tahun, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 15 (lima belas) dan Staf nilainya 22,5 (dua puluh dua koma lima). Contoh Diklat 20 JP yaitu berupa Diklat/pelatihan Bendahara, PBJ, Keuangan, Komputer, Bahasa Inggris, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dll, dimana semua kegiatan tersebut dengan data dukung sertifikat yang mencantumkan jumlah jam pelatihan atau tanggal mulai serta tanggal selesai;
- d. Seminar, Workshop atau Lokakarya merupakan pelatihan sehari yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 10 (sepuluh) dan Staf nilainya 17,5 (tujuh belas koma lima);
3. **Kinerja (bobot 30%)** merupakan nilai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) tahun terakhir yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai dengan metode 3600;
4. **Disiplin (bobot 5%** mengambil dari hukuman disiplin apakah sudah diterima atau belum, apabila tidak pernah mendapat hukuman disiplin pada lima tahun terakhir, maka nilainya 5, apabila mendapat hukuman disiplin, maka nilainya akan turun sesuai tingkat hukuman disiplinya.

Metode Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN) Tahun 2024
 Kategori dalam Pengukuran IP ASN yaitu:

No	Nilai	Kategori
1	91 - 100	Sangat Tinggi
2	81 - 90	Tinggi
3	71 - 80	Sedang
4	61 - 70	Rendah
5	0 - 60	Sangat Rendah



Terdapat 4 (empat) komponen dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (PIP ASN) yaitu:

A. Kualifikasi bobot nilai 25, mengalami penyesuaian bobot dimensi Sebelumnya:

No	Nama Kualifikasi *)	Nilai
1	Pendidikan S3	25
2	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1/D.IV	15
4	Pendidikan DIII/SM	10
5	Pendidikan DII/DI/SMA	5
6	Pendidikan SMP/SD	1

Saat ini:

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

B. Kompetensi bobot nilai 40



No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.

B. Kinerja (Nilai SKP Tahun 2021) bobot nilai 30

Sebelumnya:

No	Keterangan Nilai Kinerja ***)	Nilai Kinerja	Nilai
1	Sangat Baik	91 - ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

Disiplin bobot nilai 5

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Ringan</i>	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Sedang</i>	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Berat</i>	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir



Rumusan IP ASN KKP sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Tabel capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pusdatin Triwulan II

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	22,50	12,50	30	5	70,00
2	Biro Perencanaan	21,84	29,39	26,63	5	82,85
3	Biro SDM Aparatur dan Organisasi	20,94	17,79	26,52	5	70,25
4	Biro Hukum	21,71	31,12	29,00	5	86,83
5	Biro HKLN	21,38	28,15	27,14	5	81,68
6	Biro Keuangan dan BMN	21,15	23,32	26,51	5	75,98
7	Biro Umum dan PBJ	20,86	34,60	25,16	5	85,63
8	Pusdatin	21,19	32,54	28,38	5	87,09

9	BPISKP	22,62	31,69	25,00	5	84,31
	Rata-rata IP ASN Setjen	21,58	26,79	27,15	5	80,51

Tabel 26. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	83,47	85,36	85,79	90,50	80,00	87,09	108,86	-	85	102,46	87	101,1

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusdatin merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode semesteran, sehingga pada Semester I Tahun 2024 ini capaian IP ASN Pusdatin adalah 87,09, nilai indeks tersebut merupakan nilai tertinggi lingkup Sekretariat Jenderal. Disebabkan karena ASN lingkup Pusdatin telah mengikuti diklat, pelatihan dan seminar-seminar serta terdapat peningkatan kualifikasi pendidikan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian IKU ini, adalah:

1. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan secara daring untuk meningkatkan kompetensi SDM Pusdatin;
2. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) KKP/pemetaan SDM berdasarkan Analisa Jabatan;
3. Memberikan motivasi tugas belajar/ijin belajar kepada pegawai Pusdatin;
4. Penertiban pengisian SKP;
5. Penertiban LHKPN/LHKSN dengan sosialisasi dari Biro SDMA;
6. Penentuan PIC untuk kelengkapan SKP dan LHKPN/LHKSN;

Sebagai tindaklanjut ke depan, agar IKU ini dapat tercapai, hal-hal yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Menyelenggarakan pelatihan/Bimtek dan seminar secara daring secara kontinyu berdasarkan kompetensi dan kebutuhan;



2. Mengusulkan diklat fungsional untuk pejabat fungsional kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP;
3. Mengumpulkan dan menginput data dukung dari masing-masing pejabat dan pelaksana untuk meningkatkan nilai kompetensi SDM di lingkup Pusdatin;
4. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur.

3.2.19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Pusdatin merupakan penilaian terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Satker Pusdatin berdasarkan LHP yang disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KKP pada tahun sebelumnya, yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh unit kerja yang menjadi objek pengawai.

Sedangkan cara pengukurannya yaitu jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti oleh Satker Pusdatin yang menjadi objek pengawasan sebanyak minimal 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan kepada Unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal KKP selama periode pengukuran pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan Memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor Nomor 2137/SJ.2/HP.510/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024, perihal Capaian IKU “Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan II Tahun 2024.

Realisasi capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” periode Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 96.77% (telah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 90 rekomendasi dari 93 rekomendasi). Pencapaian ini diperoleh berdasarkan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal oleh Unit Kerja Lingkup Setjen pada periode Triwulan IV Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas sampai dengan 31 Maret 2024.



No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Biro Perencanaan	7	7	100,00	0	00,00
2	Biro Keuangan	24	24	100,00	0	00,00
3	Biro Umum dan PBJ	35	34	97,14	1	02,86
4	Biro Hukum	0	0	100,00	0	00,00
5	Biro SDMAO	1	0	00,00	1	100,00
6	Biro Humas dan KLN	7	6	85,72	1	14,28
7	Pusdatin	5	5	100,00	0	00,00
8	LPMUKP	14	14	100,00	0	00,00
9	BPISDKP	0	0	100,00	0	00,00
TOTAL		93	90	96,77	3	03,23

Disampaikan bahwa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti (jumlah rekomendasi 5) telah tuntas ditindaklanjuti oleh Pusdatin, maka capaian indikator dilaporkan sesuai target yaitu 80% sehingga persentase capaian menjadi 100%.

Tabel 27. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin											
REALISASI					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
100	100	100	100	100	80	100	125	0	100	125	100	100

Pada tabel diatas dapat dilihat realisasi IKU Persentase Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin pada Triwulan II ini adalah 100% dengan capaian 125%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasinya telah melebihi target Triwulan II sebesar 80%. Realisasi tahun 2023 dan triwulan II 2024, menunjukkan angka yang sama yaitu 100%, hal ini disebabkan karena semua rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusdatin sudah dilaksanakan.

Kegiatan yang telah ditindaklanjuti untuk pencapaian IKU ini adalah :

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan untuk penyelesaian dan tindaklanjut rekomendasi; dan
2. Memberikan data dukung rekomendasi dan saran hasil evaluasi/review dari Inspektorat Jenderal KKP.

3.2.20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari Unit Kerja Level I dan II yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi Manajemen Pengetahuan.

Sejak Triwulan III Tahun 2023 terdapat perubahan penerapan Manajemen Pengetahuan yang sudah mulai terintegrasi dalam *Portal Collaboration Office* pada laman <https://portal.kkp.go.id>, dimana Pejabat yang akan dinilai keaktifannya adalah Pejabat setingkat Eselon II karena belum semua unit kerja menetapkan Tim Kerja sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023. Dengan adanya perubahan penerapan Manajemen Pengetahuan ini maka terdapat perubahan penilaian komponen penilaian Manajemen Pengetahuan. Adapun komponen penilaian Manajemen Pengetahuan yang baru adalah :

1. Keaktifan 100%;
2. Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4; dan
3. Pegawai yang wajib dinilai adalah Eselon II dan Ketua Tim Kerja.

Menindaklanjuti pengukuran capaian IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 28. Target dan Realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Lingkup Pusdatin Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
91,14	96,06	95,59	98,32	116,67	94	133,33	141,84	14,28	94	124,117	95	140,35

Pada tabel dapat dilihat bahwa realisasi Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 133,33%, yang menunjukkan bahwa capaian sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 94%. Jika dibandingkan dengan realisasi Manajemen Pengetahuan Triwulan II tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar 14,28%.

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian tertinggi Triwulan II Tahun 2024 dicapai oleh Biro Hukum; Biro Keuangan; Biro Perencanaan; Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa; LPUMKP dan Pusdatin, dengan capaian 133,33%.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan indikator kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin adalah :

1. *Monitoring Portal Collaboration Office* Manajemen Pengetahuan; dan
2. Meningkatkan kinerja *Helpdesk Collaboration Office* Manajemen Pengetahuan.

3.2.21 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin

IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin merupakan capaian realisasi anggaran Pusdatin tahun 2024, dan merupakan hasil perhitungan capaian realisasi anggaran yang dibandingkan dengan pagu anggaran Pusdatin tahun 2024.



Tabel 29. Target dan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi												
Nama IKU	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin												
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian TW II	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	
-	-	-	99,45	99,15	-	-	-	-	95	-	96	-	

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin merupakan indikator kinerja yang dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan II Tahun 2024 belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian IKU ini, adalah:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan;
2. Melakukan administrasi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu disampaikan kepada Bendara Keuangan;
3. Melakukan pemantauan terhadap realisasi penyerapan anggaran;
4. Melakukan koordinasi dengan Biro Umum selaku pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Sebagai tindaklanjut ke depan, agar IKU ini dapat tercapai, hal-hal yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang telah ditetapkan;
2. Mempercepat proses administrasi pertanggungjawaban keuangan; dan
3. Melakukan koordinasi dengan Biro Umum selaku pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

3.3 Realisasi Anggaran

Di tahun 2024 alokasi anggaran kegiatan Pusdatin dengan DIPA Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp 129.214.041.000,- Tahun 2024 terdapat 2 kegiatan yaitu Pengelolaan Komunikasi,



Informasi Publik dan Umum (2328) dan Pengelolaan Data dan Informasi (2329). Kegiatan Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum (2328) dengan 2 Rincian Output (RO) yaitu (1) Layanan Umum dan (2) Layanan Perkantoran. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi (2329) masih menjadi kegiatan prioritas Pusdatin, dengan 3 Rincian Output (RO) yaitu (1) Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan; (2) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal; dan (3) Aplikasi Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan; dan terdapat kegiatan Prioritas Nasional dengan Rincian Output (RO) yaitu Sistem Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Terintegrasi yang Operasional. Ke dua program tersebut masuk ke dalam Program Dukungan Manajemen. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023, ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan Automatic Adjustment (AA) Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024. Terkait dengan hal tersebut, maka Pusdatin melakukan AA senilai **Rp 26.198.710.000,-** atau sebesar **20,28%** dari total pagu anggaran.

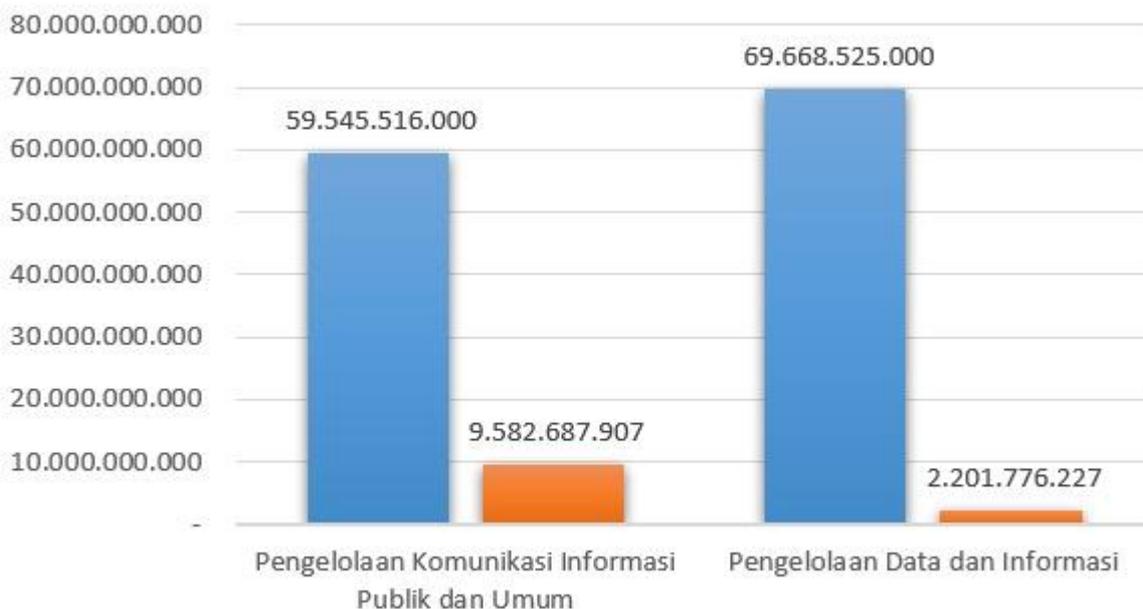
Untuk lebih jelasnya alokasi pagu dan realisasi anggaran Pusdatin sampai dengan 30 Juni 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 30. Target dan Realisasi Anggaran Pusdatin Menurut Output Tahun 2024

<i>Rincian Output (RO)</i>	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran per 30 Juni 2024 (Rp)
		(Rp)	(%)	
Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	59.545.516.000	9.582.687.907	16,09	49.962.828.093
Pengelolaan Data dan Informasi	69.668.525.000	2.201.776.227	3,16	67.466.748.773
TOTAL	129.214.041.000	11.784.464.134	9,12	117.429.576.866



Realisasi Anggaran Pusdatin TA. 2024



Gambar 12.
Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdatin Menurut Rincian Ouput Triwulan II Tahun 2024

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada tahun 2024 Pusdatin memiliki 2 Sasaran Kegiatan dan 21 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, yang merupakan turunan dari tugas, pokok, dan fungsi Pusdatin. Dari 21 Indikator Kinerja terdapat 6 indikator yang capaiannya dinilai secara triwulan, 2 indikator yang dinilai secara semesteran, dan 15 indikator yang dinilai secara tahunan.

Capaian kinerja Pusat Data, Statistik dan Informasi pada Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan aplikasi Kinerjaku, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pencapaian Kinerja Pusdatin Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Nilai Kinerja Organisasi Pusdatin pada aplikasi Kinerjaku di Triwulan II Tahun 2024 adalah **98,24**.
2. Terdapat 6 Indikator Kinerja yang penghitungannya dilakukan secara triwulan, dan 2 Indikator Kinerja yang penghitungannya dilakukan secara semester, yaitu :
 - a. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen (**capaian : 135,19%**);
 - b. Survei Kepuasan Masyarakat KKP (**capaian : 102,81%**);
 - c. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (**capaian : 0%**);
 - d. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin (**capaian : 108,86%**);



- e. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (**capaian : 125%**);
 - f. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin (**capaian : 141,84%**).
3. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023, ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024. Terkait dengan hal tersebut, maka Pusdatin melakukan AA senilai Rp 26.198.710.000,- atau sebesar 20,28% dari total pagu anggaran.
 4. Realisasi Penyerapan DIPA Pusdatin per 30 Juni tahun 2024 berdasarkan aplikasi SAKTI dari pagu senilai **Rp 129.214.041.000,-** telah direalisasikan senilai **Rp 12.454.149.929,-** dengan persentase realisasi anggaran adalah sebesar **9,64%**, dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 116.759.891.071,-**.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya. Beberapa tindak lanjut yang harus dilakukan yaitu :

1. Melakukan pemantauan terhadap indikator kinerja pada triwulan berikutnya agar realisasi dan capaian dapat melebihi target yang telah ditetapkan;
2. Melakukan monitoring terhadap seluruh progress IKU sesuai dengan periode pengukurannya. Baik tahunan, semesteran dan triwulanan;
3. Meningkatkan penyerapan anggaran dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan.



LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja Pusdatin 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PUSAT DATA STATISTIK DAN INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aulia Riza Farhan**

Jabatan : Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama
Kepala Pusat Data, Statistik,
dan Informasi

Aulia Riza Farhan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT DATA STATISTIK DAN INFORMASI**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP	1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91
		2.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Setjen (persen)	94
		3.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5
		4.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	76
		5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,05
		6.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	76
		7.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	76
		8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2,5
		9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	70
		10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP (nilai)	3
		11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai)	2,75
		12.	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,59
		13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	85
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	88,30
2.	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi	15.	Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	84
		16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (persen)	100
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100
		18.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin (indeks)	85



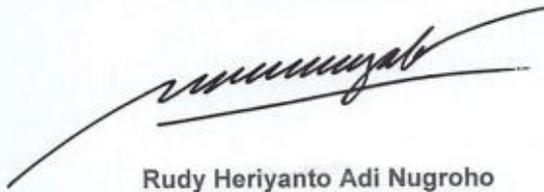
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	80
	20. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Pusdatin (persen)	94
	21. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Data dan Informasi	
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP	62.474.420.000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	
	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi	67.675.001.000
Total Anggaran Pusat Data Statistik dan Informasi Tahun 2024		130.149.421.000

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama
Kepala Pusat Data, Statistik,
dan Informasi



Aulia Riza Farhan





PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN